

## IMPLEMENTASI NILAI KEWARGANEGARAAN DALAM PENGAWASAN DAN PENGGUNAAN OBAT YANG AMAN DAN EFEKTIF DI INDONESIA

Andi Nadia Zata Amani<sup>1\*</sup>, Adelia Putri Maharani<sup>2</sup>, Aisyah Mega Shafira<sup>3</sup>,  
Ayu Paramitha Salsabilla<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Program Studi Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Bandung,  
Kota Bandung, Indonesia

Email: [andinadia624@gmail.com](mailto:andinadia624@gmail.com)

### ABSTRAK

Nilai-nilai kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam menjamin pengawasan dan penggunaan obat yang aman, bermutu, dan efektif di Indonesia. Permasalahan seperti peredaran obat palsu, penyalahgunaan obat, rendahnya rasionalitas penggunaan obat, serta ketimpangan akses obat menunjukkan bahwa isu kefarmasian tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab moral dan sosial warga negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai kewarganegaraan, seperti tanggung jawab, gotong royong, keadilan, disiplin, sikap kritis, dan partisipasi dalam sistem pengawasan dan penggunaan obat di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah, kebijakan pemerintah, serta regulasi terkait pengawasan obat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa integrasi nilai kewarganegaraan memperkuat peran pemerintah dan BPOM dalam pengawasan obat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan literasi obat, serta mendorong penggunaan obat yang rasional. Program seperti GeMa CerMat, Jaminan Kesehatan Nasional, dan Daftar Obat Esensial Nasional menjadi contoh nyata penerapan nilai kewarganegaraan dalam sektor kesehatan. Dengan demikian, implementasi nilai kewarganegaraan merupakan fondasi penting dalam membangun sistem kesehatan nasional yang aman, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Nilai Kewarganegaraan, Pengawasan Obat, Penggunaan Obat Rasional, BPOM, Kesehatan Masyarakat.

### ABSTRACT

*Civic values play a strategic role in ensuring the safe, high-quality, and effective regulation and use of medicines in Indonesia. Issues such as counterfeit drugs, misuse of medicines, irrational drug*

### Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed  
under a [Creative  
Commons Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*use, and unequal access to essential medicines indicate that pharmaceutical challenges are not merely technical, but are closely linked to citizens' moral and social responsibilities. This paper aims to analyze the implementation of civic values such as responsibility, solidarity, justice, discipline, critical thinking, and public participation in the supervision and use of medicines in Indonesia. The study employs a literature review method by examining scientific publications, government policies, and regulatory frameworks related to drug control. The discussion shows that integrating civic values strengthens the role of the government and the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) in drug supervision, enhances public participation in monitoring and reporting, and promotes rational drug use. Programs such as the Smart Use of Medicines Movement (GeMa CerMat), the National Health Insurance (JKN), and the National Essential Medicines List (DOEN) represent concrete applications of civic values in the health sector. Therefore, the implementation of civic values is a fundamental pillar in building a safe, equitable, and people-centered national health system.*

**Keywords:** Civic Values, Drug Regulation, Rational Drug Use, BPOM, Public Health.

## PENDAHULUAN

Pengawasan dan penggunaan obat yang aman, bermutu, dan efektif merupakan komponen fundamental dalam sistem kesehatan nasional. Obat berperan penting dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, namun juga memiliki potensi risiko apabila mutu, distribusi, dan penggunaannya tidak diawasi secara optimal. Di Indonesia, berbagai permasalahan seperti peredaran obat palsu, penyalahgunaan obat keras dan antibiotik, serta rendahnya rasionalitas penggunaan obat masih menjadi tantangan serius yang mengancam keselamatan pasien dan kesehatan masyarakat secara luas (Eprilia & Susanto, 2025; Siahaan, 2015).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan penggunaan obat tidak hanya bersifat teknis kefarmasian, tetapi juga berkaitan erat dengan penerapan nilai-nilai kewarganegaraan. Nilai kewarganegaraan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—seperti tanggung jawab, keadilan sosial, gotong royong, disiplin, sikap kritis, serta partisipasi aktif—menjadi pedoman etis dalam menjamin hak masyarakat atas kesehatan yang aman dan bermutu (Tektona, 2022; Hamid & Muis, 2024). Dalam konteks kesehatan, nilai-nilai ini menuntut setiap warga negara untuk tidak hanya menuntut hak, tetapi juga menjalankan kewajiban dalam menjaga keselamatan diri dan lingkungan sosial.

Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan obat secara komprehensif, mencakup pengawasan pra-pasar dan pasca-pasar. Namun, luasnya wilayah Indonesia serta kompleksitas rantai distribusi obat menyebabkan pengawasan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan partisipasi masyarakat

(BPOM RI, 2018). Rendahnya literasi obat dan kesadaran hukum di sebagian masyarakat turut meningkatkan risiko peredaran obat ilegal dan penggunaan obat yang tidak rasional, terutama di tengah pesatnya arus informasi digital dan iklan obat di media sosial (Aqila et al., 2025; Lestari, 2023).

Selain pengawasan, penggunaan obat yang rasional merupakan wujud konkret tanggung jawab kewarganegaraan dalam bidang kesehatan. Penggunaan obat yang tidak sesuai dosis, penghentian terapi tanpa konsultasi tenaga kesehatan, serta praktik berbagi obat resep masih sering ditemukan di masyarakat dan berkontribusi terhadap kegagalan terapi maupun resistansi antimikroba (Sulastri et al., 2021; BPOM, 2022). Di sisi lain, ketimpangan akses terhadap obat esensial antara wilayah perkotaan dan pedesaan menunjukkan perlunya penerapan nilai keadilan sosial dalam kebijakan kesehatan nasional agar setiap warga negara memperoleh hak yang setara atas pelayanan kesehatan (Nasution et al., 2020; Sari et al., 2021).

Berbagai kebijakan dan program nasional, seperti Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN), mencerminkan upaya negara dalam mengintegrasikan nilai kewarganegaraan ke dalam sistem pengawasan dan penggunaan obat (Kementerian Kesehatan RI, 2022; Hamid & Muis, 2024). Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesadaran, kedisiplinan, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk tenaga kesehatan, industri farmasi, dan masyarakat.

Oleh karena itu, kajian mengenai integrasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam pengawasan dan penggunaan obat menjadi penting untuk dilakukan secara akademik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai tanggung jawab, gotong royong, keadilan, disiplin, serta sikap kritis dan partisipatif diimplementasikan dalam sistem pengawasan dan penggunaan obat di Indonesia. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat sistem kesehatan nasional yang aman, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*literature review*). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam implementasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam pengawasan dan penggunaan obat yang aman dan efektif di Indonesia. Studi literatur memungkinkan peneliti mengkaji konsep, kebijakan, regulasi, serta temuan ilmiah yang relevan secara sistematis dan komprehensif (Tektona, 2022).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama, yaitu nilai tanggung jawab, gotong royong, keadilan, disiplin, sikap kritis, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta penggunaan obat. Selanjutnya, setiap tema dianalisis untuk melihat keterkaitannya dengan kebijakan, regulasi, dan praktik pengawasan obat di Indonesia (Eprilia & Susanto, 2025; Hamid & Muis, 2024).

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai jenis literatur, seperti artikel jurnal, regulasi pemerintah, dan laporan resmi lembaga terkait. Selain itu, peneliti juga memastikan konsistensi antara temuan literatur dengan kerangka konseptual nilai kewarganegaraan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Tektona, 2022).

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai peran nilai kewarganegaraan dalam memperkuat sistem pengawasan dan penggunaan obat yang aman, efektif, dan berkeadilan di Indonesia.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Implementasi Nilai Tanggung Jawab dalam Pengawasan Obat**

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa nilai tanggung jawab merupakan fondasi utama dalam sistem pengawasan obat di Indonesia. Tanggung jawab ini tidak hanya melekat pada pemerintah dan BPOM sebagai regulator, tetapi juga pada tenaga kesehatan, industri farmasi, dan masyarakat sebagai pengguna obat. BPOM memiliki kewenangan dalam pengawasan pra-pasar dan pasca-pasar untuk menjamin keamanan, mutu, dan khasiat obat yang beredar. Namun, efektivitas pengawasan tersebut sangat bergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan perannya secara profesional dan berintegritas (BPOM, 2023; Eprilia & Susanto, 2025).

Dari sisi masyarakat, tanggung jawab diwujudkan melalui kesadaran untuk menggunakan obat sesuai dosis, mematuhi anjuran tenaga kesehatan, serta tidak membeli obat dari sumber yang tidak resmi. Studi menunjukkan bahwa perilaku penggunaan obat yang rasional mencerminkan partisipasi aktif warga negara dalam menjaga keselamatan publik dan menekan risiko efek samping maupun penyalahgunaan obat (Hidayat & Rahmawati, 2021). Dengan demikian, nilai tanggung jawab dalam kewarganegaraan bersifat aplikatif dan berdampak langsung pada kualitas kesehatan masyarakat.

### **Nilai Gotong Royong dan Solidaritas dalam Edukasi dan Penggunaan Obat**

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa nilai gotong royong dan solidaritas memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat terkait penggunaan obat. Program Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat) menjadi contoh konkret kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat dalam membangun pemahaman kolektif mengenai penggunaan obat yang aman dan rasional (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Melalui kegiatan edukasi berbasis komunitas, seperti penyuluhan kesehatan, pelatihan kader, dan kampanye publik, nilai solidaritas diwujudkan dalam bentuk kerja sama lintas sektor. Kolaborasi ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dosis, efek samping, serta bahaya penggunaan obat tanpa resep, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses informasi kesehatan (Siregar & Lestari, 2023; Rizqiana & Mulyono, 2022). Oleh karena itu, gotong royong menjadi kekuatan sosial yang mendukung keberhasilan kebijakan kesehatan nasional.

### **Nilai Keadilan dan Kesetaraan dalam Akses Obat**

Implementasi nilai keadilan dalam pengawasan dan penggunaan obat tercermin melalui kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN). Kebijakan ini bertujuan menjamin akses masyarakat terhadap obat esensial yang aman, bermutu, dan terjangkau tanpa diskriminasi sosial maupun ekonomi (Nasution et al., 2020; Hamid & Muis, 2024).

Namun, hasil kajian menunjukkan masih adanya ketimpangan akses obat antara wilayah perkotaan dan pedesaan akibat keterbatasan infrastruktur, rantai pasok, serta distribusi tenaga kefarmasian. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai keadilan dalam kewarganegaraan belum sepenuhnya terimplementasi secara merata dan membutuhkan pendekatan keadilan distributif

dalam perumusan kebijakan kesehatan nasional (Sari et al., 2021). Selain akses fisik, keadilan juga mencakup kesetaraan akses informasi obat agar masyarakat mampu menggunakan obat secara aman dan efektif (Wulandari & Yusuf, 2023).

### **Nilai Kritis dan Partisipatif dalam Pengawasan Informasi Obat**

Di era digital, sikap kritis dan partisipatif menjadi nilai kewarganegaraan yang semakin penting dalam pengawasan obat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki literasi kritis cenderung lebih waspada terhadap iklan obat yang menyesatkan, informasi kesehatan palsu, serta peredaran obat ilegal di platform daring. Pemanfaatan fitur verifikasi obat seperti QR Code BPOM dan aplikasi BPOM Mobile menjadi bentuk nyata partisipasi warga negara dalam mendukung sistem pengawasan publik (Lestari, 2023).

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam forum konsultasi kebijakan dan advokasi kesehatan memperkuat transparansi dan akuntabilitas regulasi obat. Nilai partisipatif ini mencerminkan hubungan demokratis antara negara dan warga dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan (Setiawan & Putra, 2022). Pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dengan literasi kesehatan berperan penting dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum dan kritis terhadap regulasi obat (Wijayanti, 2022).

### **Nilai Disiplin dan Kepatuhan terhadap Aturan Penggunaan Obat**

Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai disiplin dan kepatuhan terhadap aturan penggunaan obat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan terapi dan keamanan kesehatan publik. Ketidakpatuhan terhadap dosis, jadwal minum obat, dan durasi terapi masih menjadi penyebab utama kegagalan pengobatan dan meningkatnya resistansi antimikroba di Indonesia (BPOM, 2022; Sulastri et al., 2021).

Penerapan sistem e-prescribing dan penguatan regulasi penggunaan obat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Disiplin dalam penggunaan obat mencerminkan kesadaran warga negara untuk menghargai ilmu pengetahuan, etika medis, dan tanggung jawab sosial terhadap kesehatan bersama (Pratama & Dewanti, 2020). Dengan demikian, nilai disiplin tidak hanya bersifat individual, tetapi juga merupakan hasil sinergi antara regulasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan partisipasi masyarakat.

### **Dampak Implementasi Nilai Kewarganegaraan terhadap Sistem Kesehatan**

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi nilai kewarganegaraan memberikan dampak positif terhadap peningkatan keamanan, efektivitas, dan keadilan dalam penggunaan obat. Kehadiran apoteker di apotek dan fasilitas kesehatan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, pencegahan kesalahan obat, serta penguatan edukasi pasien (Hartuti & Sasongko, 2023).

Selain itu, meningkatnya kesadaran hukum dan literasi obat di masyarakat mendorong perilaku penggunaan obat yang lebih rasional dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat sistem kesehatan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Widowati & Zamroni, 2023).

## **KESIMPULAN**

Nilai-nilai kewarganegaraan berperan penting dalam menjamin pengawasan dan penggunaan obat yang aman, bermutu, dan efektif di Indonesia. Nilai tanggung jawab, gotong royong, keadilan, disiplin, serta sikap kritis dan partisipatif menjadi landasan etis bagi pemerintah, BPOM, tenaga kesehatan, industri farmasi, dan masyarakat dalam menjaga

keamanan serta rasionalitas penggunaan obat. Implementasi nilai-nilai tersebut, melalui kebijakan dan program nasional seperti GeMa CerMat, JKN, dan DOEN, mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, kepatuhan terhadap regulasi, serta pemerataan akses obat. Dengan demikian, pengawasan dan penggunaan obat merupakan wujud nyata penerapan nilai Pancasila dalam sistem kesehatan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2022). *Pedoman penggunaan antibiotik yang rasional untuk mencegah resistansi antimikroba*. BPOM RI.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2023). *Laporan tahunan pengawasan obat tahun 2023*. BPOM RI.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). (2018). *Peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan*. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.
- Eprilia, F. F., & Susanto, M. (2025). Arah politik hukum pengawasan obat dan makanan di Indonesia (Studi harmonisasi dan sinkronisasi kelembagaan serta kewenangan BPOM dan Kementerian Kesehatan). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 6(1), 85-96. <https://doi.org/10.22225/juinhum.6.1.11740.85-96>
- Hamid, S. N. C., & Muis, L. S. (2024). Tanggung jawab negara dalam menjamin akses terhadap obat esensial untuk kesehatan masyarakat. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(3), 1-17. <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i3.1258>
- Hartuti, W., & Sasongko, R. E. (2023). The influence of the presence of a pharmacist on medication management in pharmacies in Banten Province. *Eruditio: Jurnal Pengawasan Obat dan Makanan*, 3(2), 150-161. <https://doi.org/10.54384/eruditio.v3i2.146>
- Hidayat, A., & Rahmawati, L. (2021). Public awareness and responsibility in rational drug use: An Indonesian perspective. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 17(2), 85-93.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat): Panduan implementasi di komunitas*. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Lestari, D. (2023). Public participation and digital verification in combating fake medicines in Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Keamanan Kesehatan*, 12(2), 75-88.
- Nasution, D., Fitriani, A., & Rini, P. (2020). Equity in access to medicines through National Health Insurance (JKN) implementation in Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 9(2), 101-113.
- Pratama, D., & Dewanti, S. (2020). Strengthening patient compliance through e-prescribing implementation in Indonesian hospitals. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Kesehatan*, 8(3), 99-111.
- Rizqiana, S., & Mulyono, B. (2022). Community-based health education and drug use awareness: A participatory approach. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia*, 5(1), 45-56.
- Sari, N., Rahayu, L., & Dewi, A. (2021). Disparities in access to essential medicines between urban and rural areas in Indonesia. *Jurnal Farmasi dan Kebijakan Kesehatan*, 8(3), 145-156.
- Setiawan, R., & Putra, M. (2022). Civic participation in health policy-making: Strengthening accountability in drug regulation. *Jurnal Demokrasi dan Kesehatan Publik*, 8(3), 90-104.

- Siahaan, S. M. (2015). Gambaran situasi kerasionalan penggunaan obat di Indonesia. *Social Clinical Pharmacy Indonesia Journal*, 1(1), 9-14.
- Siregar, F., & Lestari, W. (2023). Cross-sector collaboration in drug literacy enhancement: The role of health workers and academics. *Jurnal Kebijakan Farmasi Indonesia*, 11(1), 78-90.
- Sulastri, N., Nugroho, D., & Rahmah, A. (2021). Patient compliance and medication adherence as indicators of citizenship discipline in health context. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 17(2), 142-153.
- Tektona, R. I. (2022). Kebijakan pendidikan kewarganegaraan dalam era disrupsi globalisasi. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 6(1), 73-85.
- Widowati, I. G. A. R., & Zamroni, M. (2023). Indonesia facing challenges of pharmaceutical care implementation in community pharmacies: A legal perspective. *Jurnal Prasada*.
- Wijayanti, E. (2022). Civic education and health literacy: Building legal awareness in rational drug use. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia*, 6(2), 112-123.
- Wulandari, S., & Yusuf, A. (2023). Health literacy and equal access to drug information among rural communities. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 34-46.